

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Setiap daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi kepentingan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan daerah dalam segala bidang. Untuk melaksanakan pembangunan pemerintah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sehingga hal ini membuat pemerintah memiliki tanggung jawab kepada publik dalam hal penggunaan anggaran tersebut. Pemerintah daerah dalam hal ini untuk mewujudkan bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang nantinya digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada publik (Mardiasmo, 2007).

Laporan keuangan menjadi faktor penting untuk pemerintah yang wajib diperhatikan dalam penyajian laporan keuangannya dan menggambarkan sebuah media pemerintahan guna mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Aditya & Surjono, 2017). Pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) standar normatif yang wajib diwujudkan dalam informasi akuntansi untuk memenuhi tujuannya. Karakter tersebut menjadi syarat normatif yang diperlukan laporan keuangan pemerintah daerah mampu melaksanakan kualitas yang dikehendaki, yaitu mampu dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Apabila informasi yang terdapat dalam



Keuangan sesuai dengan kriteria yang seharusnya, berarti pemerintah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Fauziah, 2019).

Tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) adalah memberikan informasi mengenai laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang berguna untuk para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi suatu keputusan mengenai alokasi sumber daya (Fauzan, 2020).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dinilai setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah. Presentasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal. Dalam hal ini BPK memberikan 4 (empat) macam opini audit yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 oleh BPK RI mencakup 651 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP tersebut terdiri dari berbagai jenis pemeriksaan, termasuk satu laporan keuangan, 288 hasil pemeriksaan kinerja, dan 362 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk kabupaten Sinjai setiap tahunnya mengalami peningkatan dan perbaikan terhadap laporan keuangan, sehingga BPK memberikan opini WTP selama 8 tahun berturut-turut sejak tahun 2016-2023. Meskipun pada tahun 2014-2015 sempat mendapatkan opini WDP.

Perubahan opini yang terjadi pada LKPD Pemerintah Kabupaten Sinjai.

un 2014 dan 2015 Pemerintah Kabupaten Sinjai memperoleh opini WDP, pemerintah kabupaten Sinjai berhasil meningkatkan prestasinya dengan oleh opini WTP dari tahun 2016 sampai 2023. Opini WTP diartikan



sebagai laporan yang dibuat sesuai dengan standar yang diterapkan, tidak ada kesalahan material, dan disajikan secara wajar. Meskipun begitu, pencapaian opini WTP tidak lantas berarti tidak ada temuan atau rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Dalam proses audit, BPK memberikan beberapa rekomendasi perbaikan untuk menyempurnakan penyajian laporan keuangan dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu rekomendasi yang diberikan BPK adalah peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. BPK menyarankan agar Pemkab Sinjai terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan memperkuat sistem pengendalian internal serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Fenomena tersebut menggambarkan masih banyaknya permasalahan yang terjadi baik dalam pelaporan maupun penyajian terhadap LKPD, dan hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan masih belum seluruhnya memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan (Mulia, 2018). Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran pegawai yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan (Siwambudi, 2017).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi (Setyaningrum & Atiningsih, 2019). Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan



sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan dapat digunakan dalam hal pengambilan keputusan. Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan

suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Selain itu, sumber daya manusia menjadi sangat penting karena merupakan sumber inovasi dan pembaharuan strategi, serta kompetensi SDM berkaitan dengan segala pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap yang dimiliki oleh personel dalam organisasi yang sangat mendukung keberhasilan organisasi (Perrotta, 2018). Sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi memiliki kompetensi di bidang ilmu akuntansi, maka ia akan dapat memahami logika akuntansi dengan baik kemudian menggunakan pengetahuan dan pemahamannya dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturannya. Selain itu, sumber daya manusia yang berpengalaman akan bekerja dengan cepat dalam menyusun laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan tepat waktu.

Penelitian Anggari (2019) bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. SDM yang terlatih dan berpengalaman mampu menghasilkan laporan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi, sementara kurangnya kompetensi sumber daya manusia dapat mengakibatkan kesalahan material dalam penyajian laporan. Hasil penelitian berbeda yang dilakukan Darmawan (2019), Muda dkk. (2017), Wiyani dan Viddy (2022) bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah.



Permasalahan penatausahaan aset tetap yang ada dalam LKPD dapat diatasi dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang telah disediakan oleh pemerintah kabupaten maupun kota. Keberhasilan teknologi

informasi diharapkan mampu menghasilkan informasi nilai aset yang sebenarnya dan dapat meminimalisir kesalahan pencatatan yang terjadi, Sehingga pemanfaatan teknologi informasi yang diterapkan secara maksimal dapat berdampak positif pada kualitas LKPD. Apabila dapat meminimalisir kesalahan pencatatan dan penyajian laporan keuangan dapat ditindak cepat, maka pembuatan laporan keuangan dapat semakin andal dan relevan sehingga semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka kualitas laporan keuangan semakin meningkat (Ardianto & Eforis, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Salah satu faktor keberhasilan sehingga sistem informasi akuntansi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan adalah sumber daya manusia menjadi pengguna dalam penerapan sistem tersebut. Tingkat kompetensi, partisipasi akan sangat didukung guna mewujudkan efektivitas penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan (Fachri & Mediaty, 2019) Teknologi informasi dapat meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi informasi jika digunakan secara optimal. Selain itu, dengan menggantikan kendali manual menjadi kendali komputer dapat memudahkan pemerintahan daerah untuk menyusun LKPD.

Penggunaan teknologi informasi yang tepat diharapkan informasi yang dihasilkan akan semakin baik dan akan memberikan berbagai kemudahan pada kegiatan instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas informasi nya. Teknologi informasi yang telah banyak digunakan oleh instansi ah adalah informasi akuntansi berbasis komputer. Pemanfaatan teknologi yang dimaksud seperti penggunaan perangkat lunak secara optimal,



akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memilih tingkat keakuratan yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang tepat waktu karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material (Primayana dkk. 2014).

Penelitian Herman & Meliana (2020) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat meminimalkan kesalahan dalam pencatatan dan mempercepat proses penyajian laporan. Penggunaan teknologi informasi juga memungkinkan pengolahan data secara real-time, yang sangat penting untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu laporan. Hasil penelitian berbeda yang dilakukan Gusti (2020), dan Puspita & Amelia (2018) menemukan hasil yang berbeda bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan juga tidak baik (Mardiasmo, 2016:35). Akuntansi keuangan daerah adalah satu kesatuan yang tersusun dari berbagai unsur dan prosedur yang dirancang untuk mengolah data/transaksi keuangan pemerintah daerah dalam kerangka APBD melalui pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan

poran sehingga menghasilkan laporan keuangan yang nantinya akan bagi pemakai dalam pengambilan keputusan.



Penelitian Gratiana dkk. (2022) & Mutmainnah (2020) menunjukkan penelitian bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi yang efektif mencakup pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan secara sistematis, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang tepat kepada pemangku kepentingan. Hasil penelitian berbeda yang dilakukan Putri Amelia (2018) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peneliti menambahkan variabel moderasi yakni sistem pengendalian internal. Penelitian dengan sistem pengendalian internal selama ini telah banyak dilakukan pada sektor publik maupun sektor privat. Salah satu penelitian sistem pengendalian internal pada sektor publik dalam bidang kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Kapriana dan Agung (2020) yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai pemoderasi. Hasil penelitiannya bahwa sistem pengendalian internal pemerintah daerah berfungsi untuk memastikan bahwa semua proses dan aktivitas yang berkaitan dengan laporan keuangan berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebagai pemoderasi, sistem pengendalian internal dapat mempengaruhi hubungan antara faktor-faktor di atas dan kualitas laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal juga berperan dalam meningkatkan akurasi dan kredibilitas laporan keuangan. Ketika sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik, ia dapat memoderasi hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga memberikan dampak yang positif terhadap kualitas laporan yang dihasilkan. Dengan adanya SPI, setiap aktivitas dalam penyusunan laporan keuangan dapat lebih terkontrol



dan diawasi dengan ketat, yang pada gilirannya akan meningkatkan keandalan dan transparansi laporan keuangan yang disajikan (Kurniawan, 2017).

Grand Theory yang menjadi sebuah landasan dalam penelitian ini merupakan *Stewardship Theory*. Dalam *stewardship theory* mengasumsikan bahwa kepuasan dan kesuksesan organisasi memiliki hubungan yang kuat. Teori ini juga menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini dapat diterapkan dalam sektor publik, seperti pemerintah atau seorang pemangku kepentingan tidak akan memenuhi keinginan pribadi namun lebih kepada kepentingan suatu organisasi yang ditekuni. Hal ini membuat steward (SKPD) dan juga principal (masyarakat) terhindar dari konflik kepentingan. seseorang yang bekerja dalam suatu SKPD diharapkan lebih mengutamakan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Ketika *steward* dan *principal* sudah mampu berjalan berdampingan tanpa adanya konflik kepentingan maka kinerja suatu SKPD tersebut dapat dinilai baik.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan dasar dari penelitian ini. Sebagai contoh, penelitian oleh Fathia N dkk. (2020) menguji pengaruh sistem pengendalian internal serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memiliki kesamaan pada variabel independen, yaitu sistem pengendalian internal serta pemanfaatan teknologi informasi, dan variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan daerah. Namun, perbedaannya terletak pada variabel moderasi yang digunakan. Dalam penelitian ini, variabel moderasi adalah sistem pengendalian

sedangkan penelitian Fathia N dkk. (2020) menggunakan komitmen sebagai variabel moderasi.



Alasan perubahan ini adalah karena sistem pengendalian internal (SPI) dapat memberikan pengaruh tambahan terhadap hubungan antara variabel independent seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Kapriana dan Agung (2020) mendukung penggunaan SPI sebagai variabel moderasi dengan menunjukkan bahwa SPI memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa SPI efektif dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan melalui fungsi moderasinya yang memperkuat hubungan antara variabel independen dan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian Ryan dkk. (2018) memberikan dukungan empiris tambahan untuk pemilihan SPI sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menilai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi dengan SPI sebagai variabel moderasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan menemukan bahwa SPI menunjukkan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memoderasi hubungan antara variabel independen dan hasil laporan. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi dan objek penelitian. Penelitian oleh Fathia N dkk. (2020) dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian ini dilakukan hanya pada Pemerintahan Kabupaten Sinjai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang dapat dibuat sebagai berikut.



1. Apakah Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah sistem pengendalian internal memoderasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan atas rumusan masalah yang dibuat. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis berikut ini.

1. Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Sistem pengendalian internal dalam memoderasi pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Sistem pengendalian internal dalam memoderasi pengaruh pemanfaatan



ogi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

6. Sistem pengendalian internal dalam memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian tambahan mengenai sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Kegunaan Praktis, Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten sinjai dalam rangka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi (2013), yang terdiri dari 4 bab sebagai berikut.

Bab I adalah Pendahuluan. Bab yang menguraikan secara singkat latar belakang penelitian yang menjadi pokok pikiran, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka. Bab yang memuat uraian sistematis tentang landasan teori penelitian ini.

Bab III adalah Kerangka konseptual dan hipotesis. Bab yang berisi mengenai kajian teoritis dan empiris mengenai masalah penelitian ini serta pengembangan hipotesisnya.



Bab IV adalah Metode penelitian. Bab ini berisikan penjelasan mengenai penelitian, rancangan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, serta teknik pengambilan data dan analisisnya.

Bab V adalah Hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang data-data utama penelitian dan hasil analisis atau pengujian yang dilakukan terkait data-data yang ada dan hasil pengujian hipotesis

Bab VI adalah Pembahasan. Bab ini berisi tentang pembahasan atau penjelasan lebih lanjut terkait dengan hasil analisis data yang telah dilakukan

Bab VII penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran. Bab penutup dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian serupa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori *Stewardship*

Stewardship Theory adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidak lagi termotivasi oleh tujuan-tujuan individu akan tetapi lebih mengarah pada sasaran hasil utama mereka yang digunakan untuk kepentingan organisasi. Kesuksesan di dalam suatu organisasi dapat menggambarkan maksimalisasi kelompok prinsipal dan manajemen, maksimalisasi kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Donalson & Davis, 1997).

Stewardship Theory dalam sistem pemerintahan, pemerintah selaku *steward* bertugas untuk bergerak sesuai dengan keinginan *principal* mereka yaitu masyarakat. Pemerintah melakukan segala perencanaan kegiatan dan pengoperasian kegiatan mereka untuk tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat di sini adalah kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan para *steward* guna kepentingan sasaran organisasi pemerintahan. Pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada *principal* dalam pelaksanaan tugasnya.

Konsep *stewardship* tidak dibebani kewajiban untuk melaporkan dan mengacu pada pengelolaan atas aktivitas secara ekonomis dan efisien, sedangkan *accountability* mewajibkan pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab Mardiasmo (2009). *Stewardship* (suatu



layani), merupakan suatu pandangan baru tentang mengelola dan
kan organisasi yang bergeser dari konsep kepemimpinan dan

manajemen yang mengendalikan (*control*) dan mengarahkan, ke arah konsep pengaturan, kemitraan, dan kepemilikan secara bersama oleh anggota organisasi, yang merasa organisasi menjadi sesuatu miliknya ataupun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri.

Stewardship Theory memandang bahwa pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah, selaku pihak yang berperan sebagai steward akan bertindak sesuai dengan kesadarannya bagi kepentingan masyarakat, sehingga implikasi pada penelitian ini adalah pemerintah daerah akan menyusun dan menyajikan laporan keuangannya baik dan berkualitas mungkin untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi pemerintah. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, meningkatkan kompetensi aparatur yang bekerja dibidang akuntansi atau aparatur penyusun laporan keuangan, meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, dan pengimplementasian SPI.

Stewardship Theory diasumsikan pemerintah daerah sebagai pengelola meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemerintah pusat dan keinginan serta kebutuhan masyarakat selaku principal. Pemerintah daerah akan berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang undangan, ketika terjadi benturan antara kepentingan dua pihak tersebut, pemerintah daerah sebagai Steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena pemerintah daerah merasa kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan aturan pemerintah pusat dan sesuai keinginan serta kebutuhan masyarakat merupakan pertimbangan yang rasional karena pemerintah daerah lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi

n pada tujuan individu.



2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.1.2.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi sering disamakan dengan kecakapan untuk melakukan sesuatu dan saling mempengaruhi semua aspek dalam organisasi tersebut. Tanpa memiliki kompetensi yang baik, sebuah organisasi akan berjalan tidak lancar ketika hendak mencapai tujuannya. Menurut KBBI, kompetensi adalah wewenang atau kekuasaan untuk menetapkan (memutuskan sesuatu); kemampuan untuk menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah.

Menurut Arens dan Elder (2012). Kompetensi adalah pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang menentukan sebuah pekerjaan seseorang. Sedangkan menurut Azmy (2015), kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki oleh seseorang dan digunakan dalam cara yang tepat, konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Wardani dan Andriyani (2017) mengatakan bahwa kompetensi adalah sebuah karakter yang mendasari seseorang yang berkaitan kasual untuk acuan kriteria efektivitas dan atau unggul dalam pekerjaan atau situasi.

Serupa dengan Nurillah dan Muid (2014) kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga Berdasarkan pengertian yang telah disebut di atas, maka dapat disintesis, kompetensi adalah



... dan kemampuan seseorang atau karyawan dalam menggambarkan

tentang apa yang harus diketahui atau dilakukan agar dapat melakukan tugas atau pekerjaan yang diberikan diselesaikan dengan baik.

2.1.2.2 Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) didalam sebuah perusahaan atau organisasi memiliki peran yang sangat penting. Pengelolaan, perencanaan dan pengoorganisasian dilingkungan perusahaan memerlukan Sumber Daya Manusia untuk menjalankan prosesnya. SDM atau Karyawan adalah aset perusahaan yang penting untuk di perhatikan perusahaan sekaligus harus di jaga sebaik mungkin (Istijanto, 2010). Melihat kondisi di atas manajemen SDM sangat dibutuhkan perusahaan untuk mengatur dan mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kondisi, tugas dan keadaan sumber daya manusia atau karyawan di dalam sebuah perusahaan.

SDM sebagai penggerak dari sistem informasi yang ada untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten sehingga mampu menjalankan sistem dengan baik. Larasati (2018) menyatakan SDM adalah faktor sentral dalam suatu organisasi, apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi, misi dan tujuan untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia, jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau oraganisasi. SDM adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan terhadap usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Samsuni, 2017)

2.1.3.2 Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia

SDM adalah aset terpenting di dalam perusahaan. Namun demikian pada aannya tidak mudah bagi perusahaan untuk menjadikan SDM sebagai g bermanfaat. Untuk bisa menentukan SDM yang baik harus dilihat dari stik kompetensi yang mereka miliki. Kompetensi sumber daya manusia



memiliki beberapa karakteristik yang beragam, dari setiap karakteristik tersebut memiliki arti dan pemahaman yang berbeda-beda. Oleh sebab itu perusahaan harus bisa memilih karakteristik kompetensi SDM yang baik dan bermanfaat.

Menurut Anggraini (2016), ada beberapa karakteristik dalam kompetensi sumber daya manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, aspek citra diri, motif sosial, ciri-ciri, pola pikir dan cara berpikir, rasa dan bertindak. Sedangkan menurut Ihsanti (2014) terdapat lima tipe karakteristik dalam kompetensi sumber daya manusia yaitu motif, sifat diri, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian menurut Anggraini (2016), yang menyebabkan efektivitas dari individu adalah kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, motivasi, dan stres. Menurut Wardani dan Andriyani (2017), kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik pribadi yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.

2.1.3.2 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia

Indikator yang digunakan untuk mengukur sumber daya manusia (Wardani dan Andriyani, 2017) adalah.

- 1) Pengetahuan
- 2) Keterampilan
- 3) Pelatihan
- 4) Sikap
- 5) Tanggung Jawab

2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi



2.1.3.1 Pengertian Teknologi Informasi

Secara umum teknologi informasi adalah sebuah alat yang membantu dalam menyimpan, membuat, mengubah, mengkomunikasikan dan

menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi pemakainya. Indrajit (2011) teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan data yang dapat menghasilkan sebuah informasi dalam batas-batas ruang dan waktu.

Darmawan (2012) teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap penyampaian informasi dari pengirim ke penerimanya, sehingga penerima lebih lama menyimpan sebuah informasi dan pengirim lebih luas jangkauan untuk menyebar informasi.

Pemanfaatan teknologi juga berhubungan dengan perilaku yang menggunakan teknologi tersebut untuk menyesuaikan tugas dalam melakukan pekerjaan. Pengukuran berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang meningkatkan kinerja organisasi maupun kinerja individu yang bersangkutan.

2.1.3.2 Fungsi dan Tujuan Teknologi Informasi

Sutarman (2012) mengatakan bahwa terdapat enam fungsi teknologi informasi, diantaranya sebagai berikut.

1) Menangkap (*Capture*)

Sebagai penangkap (*Capture*) mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas dan penerimaan dari *input keyboard, scanner*, dsb.

2) Mengolah (*Processing*) mengolah/memproses data masukan yang diterima untuk dijadikan suatu informasi pengolahan atau pemrosesan dapat berupa pengolahan data ke bentuk lain (konversi), analisis kondosis (analisis). Perhitungan (kalkulasi), penggabungan (sintetis), segala bentuk data dan informasi.



enghasilkan (*Generating*) menghasilkan atau mengorganisasi informasi dengan bentuk yang berguna. Contohnya: laporan, grafik, tabel, dan sebagainya.

- 4) Menyimpan (*Store*) merekam atau menyimpan data dan informasi kedalam suatu media untuk keperluan lainnya. Contoh: laporan, grafik, tabel, dan sebagiannya.
- 5) Mencari kembali (*Retiva*) menelusuri mendapatkan kembali informasi atau menyalin (*copy*) data informasi yang telah tersimpan. Contoh : *supplier* yang sudah lunas dan sebagiannya.
- 6) Transmisi (*Transmission*) mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui jaringan komputer contohnya: mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya.

Sutarman (2009) mengemukakan tujuan dari teknologi informasi adalah sebagai berikut. a. Untuk memecahkan masalah, b. Untuk membuka kreativitas c. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan Sedangkan menurut Marimin, Hendri dan Haryo (2006) mengemukakan: Tujuan teknologi informasi adalah membantu mempercepat proses, mengurangi tingkat kesalahan, mengolah data dan akhirnya menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan.

2.1.3.3 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan menggunakan lima indikator dari Bodnar (2000) yang dikembangkan dari kuesioner Rijalul Fikri (2017). Kelima indikator tersebut yaitu sebagai berikut. 1) Keamanan Data, 2) Waktu, 3) Ketelitian, 4) Variasi laporan dan output 5) Relevansi

2.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah



Prlina dan Rasdianto (2013) sistem akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, dan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sementara pengertian sistem akuntansi keuangan daerah terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang bagaimana pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 70 ayat 1 yang berbunyi: "Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi". Sedangkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 23 ayat 1, menyatakan bahwa: "Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer". Selanjutnya dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 Ayat 8, menyatakan bahwa: "Sistem akuntansi pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah daerah". Pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses



i dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD baik anual maupun menggunakan komputer.

2.1.4.2 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Halim (2012) Menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi selain kas, dan akuntansi asset. Disempurnakan oleh Permendagri menjadi 5 prosedur sistem akuntansi keuangan daerah yang meliputi sebagai berikut.

1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer.

2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD atau SKPKD.

3) Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Prosedur akuntansi aset adalah serangkaian proses, baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendalian dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD atau SKPKD.



4) Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

5) Penyajian Laporan Keuangan

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

2.1.4.3 Manfaat dan Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), manfaat dilakukannya sistem akuntansi keuangan daerah yaitu dapat menyelenggarakan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, yaitu oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya serta penggunaan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh pihak eksternal (Mardiasmo, 2008).

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, dian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002). Menurut pengertian di atas peneliti



menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sebagai prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak eksternal.

2.1.4.4 Indikator SAKD

Indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (Permadi 2013) adalah.

- 1) Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Karena sistem akuntansi pemerintah merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.
- 2) Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya. Prosedur Pencatatan akuntansi pemerintahan daerah harus didasarkan pada kesesuaian dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum.
- 3) Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik untuk mengukur kinerja secara periodik dan untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.5.1 Pengertian Kualitas LKPD



Laporan keuangan pemerintah bertujuan dalam pelaporan keuangan, tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Penggunaan istilah "keuangan" meliputi seluruh laporan dan penjelasan yang mengikuti

laporan tersebut. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan proses akuntansi yang dapat memberikan informasi tentang kesehatan keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu instansi. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang berguna bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan yang berasal dari internal maupun eksternal instansi. Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang kurangnya setahun sekali.

Laporan keuangan merupakan laporan yang dirancang untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang digunakan oleh pihak manajemen, investor, kreditor, pemerintah, masyarakat dan lainnya dengan tujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Mereka menggunakan laporan keuangan agar dapat memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas suatu instansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan instansi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan suatu instansi. Laporan keuangan terdiri dari beberapa informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu instansi, dan informasi tersebut menjadi gambaran kinerja keuangan instansi. Laporan keuangan merupakan suatu ikhtisar keuangan yang menyediakan informasi yang mendasari keputusan ekonomi. Maksudnya adalah adanya hubungan langsung suatu relevansi informasi akuntansi dan alokasi

laya dengan efisien.

laporan keuangan pemerintah menyediakan informasi yang berguna nilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi,



social, maupun politik. Hal ini telah berlaku dalam SAP No. 24 Tahun 2005 dengan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah laporan administrasi publik yang memberikan informasi tentang kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas.

2.1.5.2 Tujuan LKPD

Pelaporan keuangan pemerintah menurut standar akuntansi pemerintahan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, atau politik.

Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut (Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua).

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.



- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.5.3 Indikator Kualitas LKPD

Keempat karakteristik prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010), yaitu sebagai berikut:

- 1) Relevan.

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan ketika informasi dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta dapat mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Informasi yang dapat dikatakan relevan sebagai berikut.

- a. Memiliki manfaat umpan balik yang mana Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu
- b. Memiliki manfaat prediktif yang membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang dengan hasil masa lalu
- c. Informasi disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan
- d. Pengungkapan dalam informasi harus jelas sehingga mampu mencegah terjadinya kekeliruan dalam penggunaan informasi

Andal



Informasi dalam laporan keuangan tahunan bebas dari pengetahuan yang menyesatkan atau kesalahan material, benar dalam segala hal dan dapat diverifikasi. Informasi tersebut mungkin relevan, tetapi penggunaannya dapat menyesatkan jika sifat atau representasinya tidak dapat diandalkan.

- a. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.
 - b. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh
 - c. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu
- 3) Dapat dibandingkan

Informasi yang ada dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya ataupun dengan entitas laporan keuangan yang lain pada umumnya.

- 4) Dapat dipahami

Informasi yang telah tersaji dalam laporan keuangan dapat memberikan pemahaman yang mudah oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal

2.1.6.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal



Setiap instansi khususnya instansi pemerintah harus menggunakan sistem pengatur kegiatan operasionalnya. Dengan menggunakan sistem yang baik instansi tersebut bisa mencegah kecurangan-kecurangan yang akan

terjadi. Salah satu sistem yang baik bagi instansi adalah sistem pengendalian internal.

Mulyadi (2017) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengertian pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang ingin dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut.

Pengendalian Internal merupakan seperangkat kebijakan dan prosedur yang berguna dalam melindungi aset/kekayaan instansi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, kemudian menjamin tersedianya informasi akuntansi instansi yang akurat, sehingga dapat memastikan bahwa semua ketentuan atau peraturan hukum/undang-undang dan kebijakan manajemen sudah dipatuhi atau dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh pegawai di dalam instansi (Hery, 2014). Wahyudi (2018) pengendalian internal adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain dalam organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal yaitu proses yang integral pada kegiatan dan tindakan dimana dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan serta seluruh pegawai agar memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari



alian internal yang dapat berfungsi dalam melakukan penilaian
en untuk melaksanakan tanggung jawab serta fungsi organisasi
ahan.

Pengendalian internal yaitu persiapan organisasi dan cara yang dipakai buat menjaga/melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat serta bisa dipercaya, memperbaiki efisiensi dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2015). Setiap kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan secara terus-menerus supaya tercapainya maksud dari organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal bukan saja mengecek ketelitian angka-angka, namun juga memberikan perhatian struktur organisasi instansi, meningkatkan efisiensi kinerja dan mengarahkan kemajuan/kesuksesan dari suatu kebijakan manajemen. Oleh karena itulah, pengendalian internal harus dipantau dan dinilai agar pengendalian internal tersebut ada manfaatnya, berhasil serta dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.6.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat diperlukan dalam suatu entitas/organisasi, sehingga adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Mulyadi (2016) tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut.

1) Menjaga Kekayaan Organisasi

Kekayaan fisik suatu instansi/organisasi bisa dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan instansi yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2) Mengecek Ketelitian dan Keandalan Data Akuntansi.

Informasi keuangan yang teliti dan andal dibutuhkan oleh manajemen dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk dasar pengambilan keputusan penting banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen. Pengendalian internal dirancang agar memberikan jaminan proses



pengolahan data akuntansi yang memberikan menghasilkan informasi keuangan teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan instansi.

3) Mendorong Efisiensi

Agar tercegahnya duplikasi usaha yang tidak diperlukan ataupun pemborosan di segala kegiatan bisnis instansi/organisasi dan agar dicegahnya penggunaan sumberdaya instansi yang tidak efisiensi. Maka dari itulah pengendalian internal ditujukan.

4) Mendorong Dipatuhinya Kebijakan Manajemen

Manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur agar tercapainya tujuan-tujuan instansi/organisasi. Pengendalian internal ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan.

Berdasarkan tujuannya pengendalian internal dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administratif (Mulyadi, 2017).

1. Pengendalian internal akuntansi (*Internal Accounting Control*) adalah bagian dari sistem pengendalian internal, terdiri dari struktur organisasi, tata cara dan skala yang dikoordinasikan terutama untuk melindungi kekayaan instansi dan mengecek keandalan data akuntansi.
2. Pengendalian internal administratif (*Internal Administrative Control*) adalah pengendalian internal yang terdiri dari struktur organisasi, langkah dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama agar mendorong terciptanya efisiensi kemudian dipatuhinya kebijakan manajemen.



2.1.6.3 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan sistem pengendalian internal (Triyanto, 2017) adalah. 1). Kontrol Lingkungan 2). Penilaian Resiko 3). Pemantauan dan Pengawasan.

2.2 Tinjauan Empiris

Durotul dkk. (2024) yang menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem pengendalian internal mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Kapriana dan Agung (2020) yang menguji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai pemoderasi. Teknik analisis data dilakukan dengan metode *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS) menggunakan perangkat lunak WarpPLS



Penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber

daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah tidak dapat memoderasi pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tetapi, sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Ryan dkk. (2018) pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, system akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian sistem pengendalian internal tidak memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Sambuaka dkk. (2020) yang menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan pengendalian berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kegiatan pengendalian dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Penelitian Fathia dkk. (2020) yang menguji pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan struktur organisasi sebagai variabel moderating. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan



bahwa sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Komitmen organisasi hanya berhasil memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan komitmen organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian Setyaningrum dan Atiningsih (2019) yang menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi di kota salatiga. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, komitmen organisasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Fauziah (2019) yang menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan



pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang, tidak berpengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi aparatur

pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang, tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Serang.

Penelitian Andrianto dan Rahmawati (2018) yang menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD, Komitmen Organisasi tidak dapat memperkuat pengaruh Kapasitas SDM terhadap Kualitas LKPD, Komitmen Organisasi tidak dapat memperkuat pengaruh Pemanfaatan TI terhadap Kualitas LKPD, Komitmen Organisasi tidak dapat memperkuat pengaruh SPIP terhadap Kualitas LKPD.

Penelitian Ade dkk. (2020) yang menguji kontribusi pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal, dan komitmen organisasi dengan subyektif norma sebagai variabel moderating di Indonesia. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, komitmen organisasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

